

Y. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tindak lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang adapada Pemerintah Daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) sebagai perencanaan yang bersifat tahunan dengan mendasarkan pada RKPD sebagai salah satu pedomannya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumberdaya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan pencapaian visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 adalah Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945.

RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 saat ini memasuki tahap keempat periode tahun 2021-2025 dengan fokus pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Demikian pula dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahapan lima tahun keempat (tahun 2021-2025) dengan prioritas pembangunan daerah pada fokus :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2023, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2023 guna mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

- 1) Memberikan acuan resmi bagi Badan Kepegawaian dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam menentukan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Menjadi media akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagai penyelenggara Pemerintahan yang baik

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 adalah :

- a. Memasukan Program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintah di bidang Kepegawaian dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan hambatan.
- c. Merumuskan indikator pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah selama satu tahun.
- d. menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan serta Menjamin tercapainya sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2023. Badan kepegawaian daerah melaksanakan 2 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota dan program kepegawaian. Program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan mendapat anggaran APBD sebesar Rp 8.185.103.468,- dan program kepegawaian Terdiri dari 4 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan mendapat anggaran APBD sebesar Rp. 5.945.021.782,- sehingga total anggaran APBD tahun 2023 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 14.130.125.250,-. Capaian kinerja dan realisasi anggran tahun 2023 sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD2023		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Nilai Sakip - IRB	51 60,4	8.185.103.468	62,7	51,33	ST	ST
2.	Program Kepegawaian Daerah - <i>indeks Profesionalitas ASN</i>	65,59	5.945.021.782	79,3	38,15	ST	ST
Rata-rata				71	44,74	ST	ST

Keterangan: SR (Sangat Rendah), R (Rendah), Sedang (S); T (Tinggi), ST (Sangat tinggi)

Pada tabel di atas penilaian kinerja dilakukan sampai dengan triwulan II. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 di atas menyebutkan bahwa tingkat capaian kinerja secara keseluruhan sudah di atas 50%. sedangkan capaian kinerja sub kegiatan yang kurang dari 50% dikarenakan beberapa kegiatan masih berjalan dan beberapa kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV. Berikut ini adalah rekapitulai evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKD sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA BKD KABUPATEN PEMALANG DAN PENCAPAIAN RENSTRA
BKD KABUPATEN PEMALANG S/D TAHUN 2023**

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023								Capaian Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD (Tahun 2023) %	
							I		II		Total			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03	Kepegawaian		Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5.03.04	Badan Kepegawaian Daerah			30.647,00	14.130.125.250	15.760	2.661.637.425	8.502,00	4.192.920.147	24.262	6.469.295.311	79,17	45,78
	5	Unsur penunjang urusan pemerintahan			298,00	8.185.103.468	96	1.816.030.205	104,00	2.492.262.716	200,00	4.201.092.450	67,11	51,33
			RB dan SAKIP	Nilai										
1	5.03.01.2. 01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran , pengendalian,		4	12.500.000	1	29.250	2	4.472.750	3	4.502.000	75	36,02

			laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD											
1	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4,00	12.500.000	1	29.250	2	4.472.750	3	4.502.000	75	36,02
8	5.03.01.2.02	Admnistrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu		12,00	7.080.474.500	3	1.538.401.873	3	2.268.432.534	6	3.806.834.407	50	53,77
	5.03.01.2.02.01	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12,00	7.080.474.500	3	1.538.401.873	3	2.268.432.534	6	3.806.834.407	50	53,77
	5.03.01.2.05	Admnistrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		70,00	45.639.600	-	-	56	42.546.000	56	42.546.000	80	93,22

	5.03.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah penyelenggara dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70,00	45.639.600	-	-	56	42.546.000	56	42.546.000	80	93,22
20	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			91,00	447.862.35038		151.897.628	20	73.458.934	58	151.897.608	64	33,92
22	5.03.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	8,00	4.330.000	7	1.265.000	-	540.000	7	1.805.000	88	41,69
25	5.03.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Paket	35,00	214.815.850	15	20.063.700	10	22.635.934	25	42.699.634	71	19,88
26	5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia, jumlah penggandaan yang tersedia	Paket	2,00	18.884.000	2	1.391.000	-	5.232.500	2	6.623.500	100	35,07

28	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia, jumlah surat kabar yang tersedia	dokumen	2,00	13.250.000	2	4.700.000	-	2.100.000	2	6.800.000	100	51,32
4	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	laporan	4,00	5.742.500	2	580.000	-	-	2	580.000	50	10,10
34	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	laporan	40,00	190.840.000	10	50.438.974	10	42.950.500	20	93.389.474	50	48,94
5	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,00	19.544.000	-	-	2,00	1.233.000,00	2	1.233.000	67	6,31
36	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	laporan	3,00	19.544.000	-	-	2	1.233.000	2	1.233.000	67	6,31
38	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			20,00	310.744.700	8	67.611.437	4	68.377.998	12	135.989.435	60	43,76

		Pemerintahan Daerah												
39	5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	3,00	3.700.000-	514.000	1	863.400	1	1.377.400	33	37,23	
40	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumbe daya air dan listrik yang disediakan	laporan	5,00	170.921.5005	34.909.437	-	39.772.725	5	74.682.162	100	43,69	
41	5.03.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12,00	136.123.2003	32.188.000	3	27.741.873	6	59.929.873	50	44,03	
16	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98,00	268.338.31846	58.090.017	17	33.741.500	63	58.090.000	64	21,65	

42	5.03.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	40,00	37.700.000	20	9.793.000	5	3.255.000	25	13.048.000	63	34,61
43	5.03.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	40,00	25.214.650	20	4.507.000	5	6.998.500	25	11.505.500	63	45,63
44	5.03.01.2.09.03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional	Unit	1,00	30.150.000	-	-	1	10.679.000	1	10.679.000	100	35,42
46	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	15,00	133.726.400	5	3.945.000	5	10.419.000	10	14.364.000	67	10,74

48	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2,00	41.547.268	1	6.103.500	1	2.390.000	2	8.493.500	100	20,44
		Program Kepegawaian			30.349,00	5.945.021.782	15.664	845.607.220	8.398	1.700.657.431	24.062	2.268.202.861	79	38,15
49	5.03.02.2.01	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN			22.751,00	1.616.000.000	8.991	312.297.320	7.071	278.054.719	16.062	312.290.249	71	19,32
17	5.03.02.2.01.02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN, dan usulan kebutuhan formasi	Dokumen	1,00	285.000.000	-	16.204.448	1	57.265.000	1	73.469.448	100	25,78
51	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPK	Dokumen	1,00	1.005.000.000	-	4.696.082	1	124.586.220	1	129.282.302	100	12,86
			Jumlah Fasilitasi Pengadaan PND dan PPPK	Kegiatan	1,00	-	-	-	1	-	1	-	100	-

54	5.03.02.2.01.06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian	sk	610,00	110.000.000	147	2.295.000	100	33.367.999	247	35.662.999	40	32,42
57	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jaringan internet server 30	bulan	12,00	86.000.000	3	8.880.000	3	15.438.000	6	24.318.000	50	28,28
			jumlah sistem informasi	Modul	1,00	-	-	-	1	-	1	-	100	
			Media Q dan A	Bulan	12,00	-	3	-	-	-	3	-	25	25,00
58	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data kepegawaian	jumlah dokumen elektronik	Dokumen	6.000,00	100.000.000	2.468	2.160.000	1.417	26.947.500	3.885	29.107.500	65	29,11
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur/jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	dokumen	10.000,00	-	3.898	-	4.027	-	7.925	-	79	
			jumlah kegiatan penghitungan	kegiatan	12,00	-	3	-	3	-	6	-	50	-
			jumlah tata naskah	lembar	6.000,00	-	2.468	-	1.417	-	3.885	-	65	

59	5.03.02.2.01.12	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	jumlah buku ASN yang disusun dalam angka/jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	buah	100,00	30.000.000-	-	-	100	20.450.000	100	20.450.000	100	68,17
			jumlah evaluais data	Kegiatan	1		1		-		1		100	-
60	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			683	993.595.000	118	30.645.400	11	350.534.592	129	381.179.992	19	38,36
61	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN pelaksana yang di mutasi, ASN struktural yang di mutasi	PNS	520	100.000.000	18	6.211.000	-	13.235.500	18	19.446.500	3	19,45
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrai, jabatan pelaksana dan	dokumen	5		-						-	

			mutasi ASN antar daerah											
62	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan Gaji Berkala ASN, jumlah pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	12	203.595.000	3	3.570.000	3	34.547.900	6	38.117.900	50	18,72
			Jumlah pengelolaan	Dokumen	2		1		1		2	-	100	
63	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah PNS yang promosi	PNS	140	690.000.000	92	20.864.400	7	302.751.192	99	323.615.592	71	46,90
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	4		4		-		4		100	-
64	5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN			2.474	2.548.570.782	649	472.878.000	773	951.559.140	1.422	1.424.437.140	57	55,89
18	5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah dokumen AKPK/jumlah PNS yang mengikuti	Dokumen	235	50.000.000	-	4.804.500	-	400.000	-	5.204.500	-	10,41

			UKPPI dan ujian dinas											
65	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan assesment center	Jumlah PNS yang mengikuti assesment	PNS	500	200.000.000	16	4.088.500	167	15.497.500	167	19.586.000	33	9,79
			jumlah dokumen	dokumen	1		-		-				-	
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar, tugas belajar	orang	3	647.950.500	18	210.926.500	4	410.317.500	22	621.244.000	733	95,88
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen kerjasama/jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/jumlah PPPK yang	orang	1.735	1.650.620.282	615	253.058.500	602	525.344.140	1.217	778.402.640	70	47,16

			mengikuti orientasi											
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4.441	786.856.000	5.906	29.786.500	543	120.508.980	6.449	150.295.480	145	19,10
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1	318.056.000	-	14.254.500	-	73.315.950	-	87.570.450	-	27,53	
		jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	Kegiatan	2	-	-	-	1	-	1	-	50		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan/jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan	PNS	1.000	263.800.000	300	740.000	120	35.871.979	420	36.611.979	42	13,88	
			PNS	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
			PNS	2.800	-	5.600	-	-	-	-	-	-		

				PNS	400			400		400		100	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah tanda jasa yang disusulkan	PNS	150	40.000.000-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin	uji kesehatan	5	105.000.000-	2.025.000	-	4.855.851	-	6.880.851	-	6,55	
		seminar	kegiatan	1			-		-		-		
			kegiatan	36			-		-		-		
									-		-		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	Kasus	20	30.000.0006	12.317.000	6	5.415.200	12	17.732.200	60	59,11	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian	Kasus	20	30.000.000-	450.000	16	1.050.000	16	1.500.000	80	5,00	

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Tahun 2022 masih terdapat Layanan Kepegawaian Terintegrasi (SIPINTER) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Alam yang mengintegrasikan 24 jenis pelayanan di bidang kepegawaian. Layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Alam sebagai lembaga pengelola kepegawaian sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural;
2. Jabatan fungsional;
3. Jabatan Pelaksana;
4. Kenaikan gaji berkala;
5. Kenaikan pangkat;
6. Kinerja (SKP);
7. Aplikasi Kepegawaian;
8. Persuratan;
9. Absensi;
10. Penghargaan;
11. Karpeg, KPE, Karis/Karsu;
12. Cuti
13. LP2P/LHKPN;
14. Formasi;
15. Pemindahan;
16. SPPD/Legalisir;
17. Ijin Cerai;
18. Pensiun;
19. Disiplin;
20. Ujian Dinas/UKPPI;
21. Ijin/Tugas Belajar;
22. Ijin Gelar;
23. Diklat;
24. CPNS/Aduan/Gugatan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pematang

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
1	Terlaksananya jumlah surat yang tersampaikan (surat)	-	-	8000 surat, 4 orang	8000 surat, 4 orang	10 surat	3 jenis	8000 surat, 4 orang	7175 surat, 4 orang	2 surat	3 jenis	3 laporan	
2	Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia (bulan)	-	-	10 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	3 rekening	5 rekening	10 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	3 rekening	5 rekening	12 laporan	
3	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	-	-	-	-	150 unit	-	-	-	145 unit	-	-	
4	Terlaksananya jumlah pasien yang terlayani dengan baik (orang)	-	-	700 pasien	700 pasien	-	-	700 pasien	664 pasien	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
5	Terlaksananya jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik (unit)	-	-	30 unit	38 unit	78 kali	40 unit	30 unit	26 unit	66 kali	40 unit	40 unit	
6	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	-	
7	Terlaksananya jumlah kantor yang dibersihkan dengan baik (unit)	-	-	11 bulan, 3 orang	10 bulan, 3 orang	-	-	11 bulan, 3 orang	10 bulan, 3 orang	-	-	-	
8	Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki (kali)	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	-	
9	Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	1 paket, 76 buah	-	-	1 paket	1 paket, 67 buah	-	-	-	
10	Terlaksananya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	1 paket cetakan, 5 buah, 500 lbr, 20 buah	5 paket	12 paket	1 paket	1 paket cetakan, 5 buah, 423 lbr, 17 buah	4 paket	12 paket	2 paket	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
11	Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	2 paket	12 bulan	8 jenis	1 paket	2 paket	10 bulan	8 jenis	8 paket	
12	Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	-	-	4 jenis	6 jenis	4 jenis	-	4 jenis	5 jenis	4 jenis	-	-	
13	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan (paket)	-	-	1 paket	1 paket	25 jenis	-	1 paket	1 paket	24 jenis	-	-	
14	Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan (bulan)	-	-	12 bulan, 10 buku	12 bulan, 5 buku	5 jenis	5 jenis	12 bulan, 10 buku	12 bulan, 4 buku	5 jenis	5 jenis	2 dokumen	
15	Terlaksananya jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan (jenis)	-	-	10 bulan	12 bulan (4 jenis)	-	-	10 bulan	12 bulan (4 jenis)	-	-	-	
16	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri (kali)	-	-	144 keg, 5 tujuan	160 keg., 5 tujuan	150 kali	40 keg	144 keg, 5 tujuan	158 keg., 5 tujuan	142 kali	40 keg	40 laporan	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
17	Tersedianya sarana mobilitas operasional kegiatan pada BKD			2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-	
18	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	-	-	2 jenis	2 jenis	-	-	2 jenis	-	-	-	-	
19	Terpenuhinya jumlah mebelair yang tersedia	-	-	2 jenis	2 jenis	-	-	2 jenis	2 jenis	-	-	-	
20	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	-	-	4 jenis	5 jenis	-	-	4 jenis	5 jenis	-	-	-	
21	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	-	-	-	26 unit, 3 jenis	-	-	-	26 unit, 3 jenis	-	-	-	
22	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia	-	-	5 unit	10 unit	-	-	5 unit	8 unit	-	-	-	
23	Terlaksananya perbaikan gedung kantor (unit)	-	-	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
24	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun	-	-	30 unit	38 unit	30 kali	40 unit	30 unit	32 unit	30 kali	40 unit	40 unit	
25	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	-	-	10 bulan, 60 ok	12 bulan, 50 ok	-	-	10 bulan, 60 ok	12 bulan, 50 ok	-	-	-	
26	Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair (bulan)	-	-	10 bulan, 15 ok	12 bulan, 15 ok	20 kali	-	10 bulan, 15 ok	7 bulan, 9 ok	15 kali	-	-	
27	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	-	
28	Terselesaikannya jumlah SPT PNS (SK)	-	-	400 SK	300 SK	-	-	400 SK	271 SK	-	-	-	
29	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	65 peserta	1 kegiatan	72 orang	70 orang	65 peserta	1 kegiatan	72 orang	70 orang	70 orang	
30	Terlaksananya pelatihan teknis/bintek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD	-	-	2 kegiatan	1 kegiatan, 75 orang	-	-	2 kegiatan	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
31	Terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku)	-	-	10 buku	10 buku	10 dokumen	-	10 buku	10 buku	10 buku	-	-	
32	Terselesaikannya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran (buku)	-	-	10 buku	10 buku	-	-	10 buku	10 buku	-	-	-	
33	Terselesaikannya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (buku)	-	-	10 buku	10 buku	-	-	10 buku	10 buku	-	-	-	
34	Terlaksananya monev dan laporan perkembangan kegiatan SKPD (bulan)	-	-	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	9 bulan	-	-	-	
35	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (buku)	-	-	50 buku, 6 dokumen	70 buku, 6 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	50 buku, 6 dokumen	65 buku, 6 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
36	Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang)	-	-	247 orang	80 orang	-	-	247 orang	73 orang	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
37	Terkirimnya pejabat struktural mengikuti diklatpim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang)	-	-	21 orang	9 orang	-	-	21 orang	-	-	-	-	-	
38	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang)	-	-	25 orang	32 orang	-	-	25 orang	28 orang	-	-	-	-	
39	Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kabupaten Pematang Jaya (orang)	-	-	15 orang	32 orang	-	-	15 orang	26 orang	-	-	-	-	
40	Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang)	-	-	8 orang	5 orang	-	-	8 orang	5 orang	-	-	-	-	
41	Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme PNS.(orang)	-	-	367 orang	240 orang	-	-	367 orang	99 orang	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
42	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS di daerah sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS (orang)	-	-	120 orang	120 orang	-	-	120 orang	85 orang	-	-	-	
43	Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah PNS	-	-	10 kegiatan	1 keg.	-	-	10 kegiatan	-	-	-	-	
44	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah	-	-	175 orang	100 orang	-	-	175 orang	83 orang	-	-	-	
45	Terselesaikannya pemetaan / master plan penataan pembinaan PNS Kabupaten Pematang Jaya (buah / kegiatan)	-	-	1 kegiatan	1 dokumen	-	-	1 kegiatan	1 dokumen	-	-	-	
46	Terlaksananya hasil tes dan daftar nominatif pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang)	-	-	6.000 orang	7.600 orang	-	-	6.000 orang	7.285 orang	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
47	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK)	-	-	6.500 SK	6.600 SK	6.000 SK	12 Dokumen, 2 dokumen	6.500 SK	6.600 SK	6.000 SK	12 Dokumen, 2 dokumen	12 Dokumen, 2 dokumen	
48	Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS)	-	-	15000 file	15000 file	-	-	15000 file	14903 file	-	-	-	
49	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	-	-	14 kali	12 kali	-	-	14 kali	4 kali	-	-	-	
50	Terselesaikannya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pensiun / dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat struktural, pengangkatan kepala sekolah,	-	-	400 orang	400 orang	-	-	400 orang	392 orang	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
	penyesuaian (inpasing) jabatan fungsional guru. (orang/PNS)													
51	Terlaksananya jumlah kebutuhan alokasi formasi PNS dan pemenuhan jabatan fungsional tertentu	-	-	20 buku	20 buku	-	-	20 buku	17 buku	-	-	-	-	
52	Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik sebanyak dan pejabat fungsional yang diangkat dan dinaikkan jabatannya	-	-	4 kali	3 kali	-	-	4 kali	2 kali	-	-	-	-	
53	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	-	-	2 kali	2 kali	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	
54	Terselesainya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS	-	-	300 SK	300 SK	-	-	300 SK	283 SK	-	-	-	-	
55	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS purna tugas yang memperoleh tali asih (SK / Orang)	-	-	409 SK Pensiun	505 SK Pensiun	-	-	409 SK Pensiun	494 SK Pensiun	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
56	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana	-	-	2 keg.	-	-	-	2 keg.	-	-	-	-	-	
57	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN	-	-	2 keg.	2 keg.	-	-	2 keg.	1 keg	-	-	-	-	
58	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam)	-	-	75 piagam	75 piagam	-	-	75 piagam	68 piagam	-	-	-	-	
59	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK Hukuman Disiplin (SK)	-	-	10 PNS	10 PNS, 90 Peserta sosialisasi	-	-	10 PNS	10 PNS, 86 Peserta sosialisasi	-	-	-	-	
60	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	-	-	10.500 PNS	10.500 PNS	13 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	10.500 PNS	10.500 PNS	13 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	
61	Terlaksananya penegakan disiplin aparatur melalui pembinaan dan	-	-	50 satker	60 satker, 30 kali, 20	-	-	50 satker	55 satker, 28 kali, 19	-	-	60 orang		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
	inspeksi pada tiap Satuan Kerja di Pemda Kab. Pematang Jaya (satker)				mesin finger				mesin finger					
62	Terselesaikannya jumlah surat ijin / surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat)	-	-	20 Surat	20 Surat	20 kasus	25 kasus	20 Surat	18 surat	17 kasus	25 kasus	20 kasus		
63	Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu,taspen,Konversi NIP, dan LP2P (kartu)	-	-	3.500 kartu	350 karpeg, 356 karis/karsu, 356 taspen	-	-	3.500 kartu	332 karpeg, 338 karis/karsu, 338 taspen	-	-	-		
64	Fasilitasi Organisasi Profesi ASN	-	-	2 keg.	2 keg.	-	-	2 keg.	2 keg	-	-	-		
65	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang mengirimkan formulir LHKPN	-	-	42 orang	125 orang	-	-	42 orang	103 orang	-	-	-		
66	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (RKA-SKPD)	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
67	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (RKA-SKPD Perubahan)	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	
68	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (DPA-SKPD)	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	
69	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (DPA-SKPD Perubahan)	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	-	-	
70	Jumlah kinerja perangkat daerah yang di evaluasi	-	-	-	-	6 kali	-	-	-	6 kali	-	-	
71	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	-	-	-	-	1 Tahun	12 bulan	-	-	1 Tahun	12 bulan	12 bulan	
72	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	-	-	-	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	
73	Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun	-	-	-	-	350 buah	-	-	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
74	Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	-	-	-	-	6 kali	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Jumlah ASN yang di pindah tugaskan	-	-	-	-	4 orang	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	-	-	-	-	80 jenis	35 jenis	-	-	70 jenis	35 jenis	35 paket		
77	Jumlah bahan material yang dibeli	-	-	-	-	60 buah	-	-	-	60 buah	-	-		
78	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	-	-	-	15 kali	100 orang	-	-	13 kali	90 orang	4 laporan		
79	Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata	-	-	-	-	4 jenis	-	-	-	2 jenis	-	-		
80	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli	-	-	-	-	3 jenis	4 paket	-	-	3 jenis	4 paket	24 unit		
81	Jumlah buku yang di beli	-	-	-	-	5 buah	-	-	-	4 buah	-	-		
82	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	1 unit	-	-		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
83	Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan	-	-	-	-	20 ok	20 ok	-	-	20 ok	9 ok	12 laporan	
84	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar	-	-	-	-	20 kali	20 unit	-	-	11 kali	20 unit	1 unit	
85	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	-	-	-	-	15 unit	15 unit	-	-	14 unit	15 unit	15 unit	
86	Jenis aset tak berwujud yang dipelihara	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	
87	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	
88	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen, 1 dokumen	
89	Jumlah fasilitas pengadaan PNS dan PPPK	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 kegiatan	-	-	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 dokumen, 1 kegiatan	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
90	Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
91	Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
92	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian	-	-	-	-	400 SK	425 SK	-	-	366 SK	425 SK	610 SK		
93	Jumlah kegiatan evaluasi	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
94	Pengelolaan sistem informasi yang dikelola	-	-	-	-	1 Modul, 30 Mbps, 4000 record, 5000 record.	1 Modul, 30 Mbps, 4000 record, 5000 record.	-	-	1 Modul, 30 Mbps, 3650 record, 4562 record.	1 Modul, 30 Mbps, 6.136 record, 6.260 record.	12 bulan, 1 modul, 12 bulan		
95	Jumlah dokumen elektronik, jumlah id card dan kartu pegawai, jumlah kegiatan perhitungan TPP, jumlah tata naskah kepegawaian.	-	-	-	-	5000 Dokumen, 400 buah, 9 kegiatan, 5000 lbr	5000 Dokumen, 400 buah, 9	-	-	4404 Dokumen, 352 buah, 9	3.960 Dokumen, 0 buah, 9 kegiatan,	6.000 dokumen, 10.000 dokumen, 12		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
							kegiatan, 5000 lbr			kegiatan, 4404 lbr	5.932 lbr	kegiatan, 6.000 lembar	
96	Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian.	-	-	-	-	75 buah, 1 kegiatan	75 buah, 1 kegiatan	-	-	70 buah, 1 kegiatan	75 buah, 1 kegiatan	100 buah, 1 kegiatan	
97	Jumlah PNS yang dimutasi	-	-	-	-	500 PNS	520 PNS	-	-	352 PNS	476 PNS	520 PNS, 5 dokumen	
98	Jumlah PNS yang promosi	-	-	-	-	150 PNS	140 PNS	-	-	70 PNS	140 PNS	140 PNS, 4 dokumen	
99	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	-	-	-	-	1 Dok, 200 PNS	3 Dok, 200 PNS	-	-	1 Dok, 186 PNS	3 Dok, 173 PNS	235 dokumen	
100	Jumlah PNS yang mengikuti assessment	-	-	-	-	400 PNS	500 PNS	-	-	-	350 PNS	500 PNS, 1 dokumen	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
101	Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
102	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar, jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan tugas belajar	-	-	-	-	150 PNS, 3 PNS	150 PNS, 4 PNS	-	-	145 PNS, 3 PNS	122 PNS, 3 PNS	3 orang		
103	Jumlah dokumen kerjasama, jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	3 Dok, 342 CPNS	1 Dok, 353 CPNS	-	-	3 Dok, 335 CPNS	1 Dok, 353 CPNS	1.735 orang		
104	Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-		
105	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan ASN	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-		
106	Jumlah dokumen penyusunan administrasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
114	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	
115	Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	
116	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan, jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	3 orang, 1.000 PNS	4 orang, 600 PNS	-	-	3 orang, 910 PNS	4 orang, 985 PNS	1.000 PNS, 6 PNS, 2.800 PNS, 400 PNS		
117	Jumlah tanda jasa yang di usulkan	-	-	-	-	50 usulan	100 usulan	-	-	45 usulan	100 usulan	150 PNS		
118	Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-		
119	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin	-	-	-	-	5 Uji kesehatan khusus, 30 keg, 100 dok cuti,	7 Uji kesehata n khusus, 60 keg, 150 dok	-	-	5 Uji kesehata n khusus, 30 keg, 95 dok	7 Uji kesehat an khusus, 34 keg,	5 Uji kesehata n khusus, 1 kegiatan,		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
						500 LHKPN.	cuti, 500 LHKPN.			cuti, 474 LHKPN.	195 dok cuti, 400 LHKPN.	36 kegiatan	
120	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	-	-	-	-	12 kasus	20 kasus	-	-	9 kasus	13 Kasus	20 kasus	
121	Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah dikarenakan beberapa sub kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun rencana 2023 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai persoalan kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini cukup member warna tersendiri, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki, PNS yang ada tidak terdaya gunakan secara optimal, dan kinerjanya rendah. Hal itu merupakan perwujudan yang nampak sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;
2. Evaluasi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3), yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja);
3. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata;
4. Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagian besar belum terlaksana dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;
5. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai;
6. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.

Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Berdasarkan uraian isu-isu permasalahan yang ada selama ini, maka kemungkinan yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah di tahun-tahun mendatang :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan guna mendukung tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

3. Aspek Ketatalaksanaan

Adanya kekosongan jabatan untuk pejabat struktural serta tidak kesesuaian antara kompetensi dengan jabatan yang diampu, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari menjadi terkendala atau kurang maksimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi target kinerja, Perangkat Daerah membutuhkan rencana kerja dan rencana pendanaan. Rencana kerja digunakan sebagai pedoman dan menjaga agar organisasi tetap berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dan pendanaan timbul sebagai dampak atas dilaksanakannya kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berikut ini akan disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk Tahun 2023. Pada Tahun Anggaran 2023 Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang mengampu 2 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Penyusunan rencana kerja berdasarkan target capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 3.1

**Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawian Daerah
Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023**

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
1.	Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya								BKD
		Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal			12.714.364.000		17.802.571.000		
			Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya	100	9.078.364.000		9.763.941.325	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	12.500.000	100	20.500.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	4 dok	12.500.000	4 dok	12.500.000	
			Admnistrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100	7.539.843.000	100	7.670.571.000	
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	1 tahun	7.539.843.000	1 tahun	7.647.571.000	
			Admisnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	129.963.500	100	178.500.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Sosialisasi peraturan perundngan-undangan	jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	129.963.500	70 orang	75.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100	563.279.582	100	763.548.775	
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	12 jenis	20.000.000	12 jenis	64.354.775	
			Penyediaan bahan logistik kantor	jenis bahan logistik kantor yang dibeli	80 jenis	239.274.582	80 jenis	140.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis barang yang dicetak dan digandakan	5 paket	38.900.000	5 paket	30.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	5 jenis	14.000.000	5 jenis	20.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	15 kali	20.745.000	15 kali	7.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	150 kali	230.360.000	150 kali	246.674.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100.000.000	100	441.746.550	
			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli	3 jenis	100.000.000	3 jenis	219.192.800	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	381.999.000	100	428.375.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	4 jenis	6.500.000	4 jenis	26.000.000	
			penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	3 rekening	224.000.000	3 rekening	185.000.000	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan	20 ok	151.499.000	20 ok	137.500.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	350.778.918	100	255.200.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan	80 kali	37.700.000	80 kali	74.600.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional	30 kali	25.214.650	30 kali	35.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar	20 kali	31.437.500	20 kali	60.000.000	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	15 unit	218.830.000	15 unit	20.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	37.596.768	3 unit	35.600.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Program Kepegawaian	Persentase Mutasi, Rotasi, Promosi dan Pengembangan ASN	100	3.636.000.000	100	8.038.629.675	
			Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100	433.200.000	100	1.545.280.000	
			Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	jumlah dokumen ABK, formasi ASN, dan usulan kebutuhan formasi	1 dok	85.000.000	1 dok	61.550.000	
			Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPK	2 keg	165.000.000	2 keg	1.000.000.000	
			Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	jumlah dokumen administrasi pemberhentian	400 sk	47.200.000	400 sk	87.880.000	
			Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	jumlah sistem informasi yang dikelola	1 modul, 30 MBps, 4.000 record	36.000.000	1 modul, 30 MBps, 4.000 record	171.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Pengelolaan data kepegawaian	jumlah dokumen elektronik/jumlah ID card dan kartu pegawai/jumlah kegiatan perhitungan TPP/jumlah tata naskah kepegawaian	5000 dok, 400 buah, 9 keg, 5000 lbr	70.000.000	5000 dok, 400 buah, 9 keg, 5000 lbr	133.000.000	
			Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	jumlah buku ASN yang disusun dalam angka/jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	75 buah, 1 keg	30.000.000	75 buah, 1 keg	56.000.000	
			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	740.000.000	100	1.030.000.000	
			Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah PNS yang dimutasi	520 pns	100.000.000	520 pns	350.000.000	
			Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan	1.200 kp 4.800 sptkg	50.000.000	1.200 kp 4.800 sptkg	80.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah PNS yang promosi	140 PNS	590.000.000	140 PNS	600.000.000	
			Pengembangan kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN	100	2.277.000.000		5.068.846.500	
			Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah dokumen AKPK/jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan ujian dinas	2 dok, 200 pns	15.000.000	2 dok, 200 pns	51.244.000	
			Pengelolaan assesment center	Jumlah PNS yang mengikuti assesment	500 pns	100.000.000	500 pns	146.085.000	
			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	jumlah pns yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar/jumlah pns yang mengikutipendidikan lanjutan tugas belajar	4 pns 150 pns	40.000.000	4 pns 150 pns	500.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	jumlah dokumen kerjasama/jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	3 dok 342 cpns	2.122.000.000	3 dok 342 cpns	4.087.000.000	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	100	185.800.000	100	394.503.175	
			Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	13 keg	20.000.000	13 keg	65.850.000	
			Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	jumlah PNS yang terlayani dan jumlah PNS yang mendapat penghargaan	4 org 600 pns	85..800.000	4 org 600 pns	75.600.000	
			Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	jumlah tanda jasa yang disusulkan	100 usulan	35.000.000	100 usulan	50.053.175	
			Pembinaan disiplin ASN	jumlah kegiatan pembinaan disiplin	7 uji kesehatan khusus 60 keg 150 dok cuti	25.000.000	7 uji kesehatan khusus 60 keg 150 dok cuti	90.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	
					500 LHKPN		500 LHKPN		
			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	20 kasus	10.000.000	20 kasus	63.000.000	
			Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian	25 kasus	10.000.000	25 kasus	25.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023.

Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih *indikatif* sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia. Seluruh elemen pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.

Pemalang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. M. H. UNTODEWO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002